

ABSTRAK

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM REKAYASA LALU LINTAS DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

JELANG PRAKARSA

Lalu-lintas merupakan permasalahan rumit yang sering terjadi disetiap daerah perkotaan, Permasalahan tersebut sangat dipengaruhi oleh sistem ruang wilayah dan sistem jaringan transportasi itu sendiri sebagai sebuah kesatuan tata ruang. Perkembangannya yang begitu pesat terkait jumlah penduduk di kota Bandar Lampung tentunya akan berdampak dengan meningkatnya kebutuhan akan sarana transportasi, peran dinas perhubungan Kota Bandar Lampung sangat strategis sebagai salah satu instansi dalam mengurai permasalahan kemacetan yang akan terjadi, dan merupakan badan atau organisasi yang melakukan tugas pokok membantu walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang perhubungan. Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dasar Kebijakan Daerah dalam Rekayasa Lalu Lintas di kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Rekayasa Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung.

Tipe penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Noratif Empiris, yaitu pendekatan dengan cara melihat dan mempelajari literatur literatur yang berlaku dan berhubungan dengan judul dan pokok bahasan yang akan diteliti, yaitu Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Rekayasa Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung dan meneliti data primer yang diperoleh secara langsung dari wawancara guna mengetahui kenyataan yang terjadi dalam praktek dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Sedangkan pengolahan data yang diperoleh dengan cara seleksi data, pemeriksaan data, klasifikasi data dan penyusunan data serta penarikan kesimpulan. Data hasil pengolahan data dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian lapangan ke bentuk penjelasan secara sistematis sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah Daerah di Kota Bandar Lampung masih belum terlihat hasilnya. Pihak Dinas Perhubungan juga menyatakan bahwa kebijakan yang telah diterapkan tidak berjalan dengan semestinya dikarenakan masih banyak kekurangan dalam melaksanakan kebijakan yang ada. Sedangkan faktor penghambat Kebijakan yang Pemerintah Daerah dalam Rekayasa Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung yaitu jumlah kendaraan yang semakin meningkat ketersediaan arus jalan yang tidak memadai dan kondisi jalan yang rusak. Kendala lainnya ialah kurangnya koordinasi instansi terkait, penegakan peraturan yang kurang maksimal dan rendahnya kesadaran dari pengguna jalan dan pemberi jasa.

Adapun saran yang diajukan penulis yaitu, penambahan dalam pelayanan fasilitas yang diberikan, oleh karena itu diperlukan petugas dan fasilitas yang memadai agar kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan baik serta sosialisasi ataupun penyuluhan tentang Rekayasa Lalu Lintas agar meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Rekayasa Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung.

Kata kunci : Kebijakan, Rekayasa Lalu Lintas